BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor finansial memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Suatu negara yang memiliki sistem finansial kurang berkembang akan menghambat laju pertumbuhan ekonominya. Sistem perbankan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem perekonomian di semua negara. Dengan adanya perbankan maka perekonomian suatu negara akan terkontrol dengan baik karena bank sebagai sebuah institusi berfungsi sebagai perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sesuai dengan fungsinya maka industri perbankan sangat diperlukan dalam membangun ekonomi setiap negara khususnya dalam pembiayaan kegiatan yang membutuhkan dana.

Dalam kegiatan pembiayaan yang membutuhkan dana, industri perbankan melakukan strategi agar masyarakat tertarik menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka pihak perbankan akan memutar kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank sebagai lembaga keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan melayani kebutuhan pembiayaan dunia usaha serta semua sektor perekonomian sehingga dapat

dikatakan bahwa bank melancarkan arus barang serta jasa dari produsen kepada konsumen.

Sepanjang perjalanannya, industri perbankan di Indonesia banyak mengalami perubahan. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada awal abad 19 dengan didirikannya De Javasche Bank NV pada tanggal 11 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir menjadi Bank Sentral oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia. Selain De Javasche Bank pada masa penjajahan Belanda juga berdiri sejumlah bank umum, antara lain De Post Paar Bank yang didirikan pada tahun 1898 dan selanjutnya diganti menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1950, De Algemene Volks Crediet Bank yang didirikan pada tahun 1934 di Batavia dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia, De Escompto Bank yang dinasionalisir pemerintah Indonesia menjadi Bank Dagang Negara, dsb[1].

Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, perekonomian ditandai oleh inflasi yang hebat dan sistem komando yang antara lain dalam bentuk-bentuk sistem pengawasan devisa, harga dan suku bunga, inflasi yang tinggi, kesulitan neraca pembayaran luar negeri dan lain sebagainya. Perlahan-lahan sistem ekonomi komando dihapuskan melalui deregulasi yaitu, mengurangi secara berangsur-angsur campur tangan pemerintah terhadap perekonomian dan menggantikannya dengan pengaturan lewat pasar. Tujuan utama deregulasi adalah mendorong pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan Indonesia.

---

[1] Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta 2002, hal 12

Dengan adanya resesi ekonomi dunia membawa pengaruh yang tidak menguntungkan yaitu semakin memburuknya perekonomian Indonesia khususnya penerimaan dalam negeri, maka otoritas moneter mengeluarkannya deregulasi bidang perbankan yang pertama kali melalui paket kebijaksanaan 1 Juni 1983. Inti dari Paket Kebijaksanan 1983 adalah pemberian kebebasan kepada bank-bank dalam menentukan suku bunga dana pihak ketiga maupun suku bunga kredit dan dihapuskannya pagu kredit oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

Dengan dikeluarkannya kebijaksanan tersebut diharapkan agar operasi perbankan menjadi lebih efisien, mandiri dan profesional serta untuk memantapkan stabilitas moneter guna mendukung proses penyesuaian perekonomian yang kemudian dapat mendorong perkembangan kredit usaha kecil.

Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 mampu meningkatkan jumlah dana pihak ketiga hingga meningkat rata-rata lebih dari 65 %. Demikian juga halnya dengan kredit perbankan, dalam periode yang sama menunjukkan peningkatan hampir 55 % per tahun. Deregulasi 1988 juga melonggarkan izin dan persyaratan pembukaan cabang, menurunkan reserve requirements dari 15 % menjadi 2 % dan memperbaiki peraturan mengenai lending limits.

Paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 berkaitan dengan penyempurnaan program perkreditan untuk usaha kecil. Sedangkan Paket Kebijaksanaan 28 Februari 1991 dan Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 berkaitan dengan penyempurnaan pengawasan dan pembinaan serta penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya penyehatan perbankan. Melalui deregulasi

ini diharapkan setiap bank dapat melakukan pengawasan sendiri terhadap tingkat kesehatannya.[2]

Sementara itu, UU no. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan UU no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[3] Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit adalah merupakan tulang punggung kegiatan perbankan.

Sebagai lembaga perkreditan, bank harus dapat menentukan kebijaksanaan umum yang harus ditempuhnya. Kebijaksanaan yang ditempuh bank dalam pemberian kredit ini sangat erat kaitannya dengan bidang atau ruang gerak usaha bank, bentuk dan sifat kredit yang diberikan, pengaturan rencana kredit, pengorganisasian kredit, pengaturan tata cara dan prosedur pemberian kredit, pengaturan wewenang kredit, analisa kredit, penetapan plafon kredit, pengaturan administrasi kredit, pembinaan kredit dan pengamanan atas kredit yang berjalan.

Analisa kredit, yang dilakukan dengan benar dapat berjalan sebagai penyaring pertama agar bank tidak terbelit oleh kredit bermasalah. Bila sisi aktiva

---

[2] Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta 2002, hal. 10.

[3] Kasmir, SE., MM, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta 2002, hal. 12.

neraca bank diperhatikan dengan cermat, maka akan nampak bahwa bagian terbesar dana operasional setiap bank adalah jumlah kredit yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kredit adalah sumber pendapatan terbesar namun sekaligus merupakan risiko terbesar. Dan jika diperhatikan pada sisi pasiva neraca bank akan nampak bahwa sebagian besar sumber dana operasional bank adalah merupakan deposito nasabah. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan bank dalam mengelola kredit akan sangat berpengaruh terhadap dana milik nasabah yang didepositokan. Jadi pemberian kredit oleh bank haruslah melalui pertimbangan yang selektif. Sebab bila penilaian yang diberikan kurang tepat maka pemberian kredit tersebut dapat menyulitkan bank dan bahkan jika persentase kredit bermasalah pada suatu bank cukup tinggi akan dapat mengganggu likuiditas keuangan bank tersebut.

Karena besarnya peranan penilaian pemberian kredit oleh bank kepada perusahaan yang membutuhkan kredit, maka penelitian ini dilakukan guna mengkaji lebih dalam tentang kelayakan usaha yang diajukan perusahaan dalam permohonan kreditnya pada pihak bank. Hasil penelitian ini akan ditulis dalam skripsi yang berjudul: "ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG"

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu

1. Bagaimana format usulan permohonan kredit perusahaan yang dapat diterima oleh BRI Cabang Tulungagung?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen BRI Kantor Cabang Tulungagung dalam memutuskan layak atau tidak layak permohonan kredit suatu perusahaan?
3. Bagaimana kemampuan perusahaan pemohon kredit dalam mengembalikan pinjaman kredit sehingga dianggap layak untuk menerima kredit dari BRI?

1.3. Batasan Masalah

Penilaian kelayakan pemberian kredit pada BRI Cabang Tulungagung dibatasi selama tiga periode, yaitu tahun 2001-2003 dan berdasarkan pada laporan keuangan nasabah serta syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh bank yang akan memberikan kredit.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui format usulan permohonan kredit perusahaan yang dapat diterima oleh BRI Cabang Tulungagung.

2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen BRI Cabang Tulungagung dalam memutuskan layak atau tidak layak permohonan kredit suatu perusahaan.
3. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan pemohon kredit dalam mengembalikan pinjaman kredit sehingga dianggap layak untuk menerima kredit dari BRI.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Bank

   Bank dapat lebih mencermati bentuk atau format usulan permohonan kredit perusahaan yang layak untuk menerima kredit dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil pihak bank dalam memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan kredit perusahaan.

   Kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank.

2. Manfaat bagi peneliti

   Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat, menambah wawasan, serta ilmu pengetahuan. Dan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan manajemen pada umumnya dan manajemen keuangan pada khususnya.

3. Manfaat bagi masyarakat luas

Dapat mengetahui format usulan permohonan kredit yang dapat diterima oleh bank dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil bank dalam memberikan kredit kepada nasabah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian bank[1]:

1. Menurut Prof. G. M. Veryn Stuart dalam Bank Politic

   Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa giral

2. Menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

   Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992, tentang perbankan.

   Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

[1] Martono, *op. cit.*, hal. 20

2.1.2. Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.[5] Sedangkan dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Dana bank dapat bersumber dari modal sendiri, dana dari masyarakat dan dana dari lembaga lain.

1. Dana dari Modal Sendiri

   Dana dari modal sendiri (equitas) adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank dan dalam neraca bank tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva. Dana modal sendiri penting bagi kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri (CAR) yaitu sebesar 8 % dalam kondisi normal dan secara gradual ditingkatkan hingga mencapai 12 %. Dana modal sendiri diperoleh perusahaan melalui:

   a. Setoran modal dari pemegang saham, baik dari pemegang saham lama maupun pemegang saham baru.
   b. Cadangan-cadangan bank. Cadangan ini merupakan bagian dari keuntungan atau laba yang disisihkan oleh pihak bank untuk tujuan tertentu.

---

[5] Kasmir, SE, MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta 2000, hal. 61.

c. Laba bank yang belum dibagi. Laba yang belum dibagi ini merupakan laba yang memang belum dibagikan kepada pemegang saham pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana modal sendiri adalah perusahaan tidak perlu membayar bunga yang relatif besar dibandingkan dengan meminjam pada lembaga lain.

2. Dana dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling penting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Menghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif tinggi dan memberikan fasilitas yang menarik bagi masyarakat. Sumber dana dari bank dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Simpanan Giro

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

b. Tabungan

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

3. Dana dari Lembaga lain

Dana dari lembaga lain merupakan tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Dana yang diperoleh digunakan oleh bank untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Sumber dana dari lembaga lain berasal dari:

a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

b. Pinjaman Antar Bank (Call Money)

Pinjaman antar bank diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan tingkat bunga yang tinggi.

c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Pihak perbankan menerbitkan SBPU, kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

d. Pinjaman dari Bank-Bank di Luar Negeri

Pinjaman ini diperoleh dari pihak perbankan di luar negri.

2.1.3. Alokasi Dana dari Bank

Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

Alokasi dana bank atau investasi dana bank yang telah dihimpun dari berbagai sumber dana tersebut perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagian dana dari deposan menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Dalam hal ini bank perlu mempersiapkan strategi penempatan dana atau alokasi dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh tingkat rentabilitas yang tinggi, mempertahankan kepercayaan masyarakat, menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi dana bank atau investasi dana bank yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank dapat disalurkan dalam bentuk[6]:

- Non Earning Assets (Aktiva atau asset yang tidak menghasilkan), terdiri dari:
  a. Primary Reserve (Cadangan primer)

     Primary reserve berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo Bank Indonesia. Dana ini ditujukan untuk kepentingan cash ratio atau menjaga likuiditas bank sesuai dengan deregulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

  b. Penanaman Dana dalam bentuk Aktiva Tetap dan Inventaris

     Investasi dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris merupakan penanaman dana untuk menunjang kelancaran bisnis perbankan. Dana untuk aktiva tetap dan inventaris berasal dari modal awal dan dari cadangan atau laba yang tidak dibagi.

- Earning Assets (Aktiva atau asset yang menghasilkan), terdiri dari:
  a. Secondary Reserve (Cadangan Sekunder)

     Alokasi dana dalam secondary reserve bertujuan untuk menyangga likuiditas dan dana yang dapat memberikan keuntungan.

---

[6] Martono, *op. cit.*, hal. 42.

b. Loanable Funds (Kredit yang diberikan)

Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada debitur yang akan memberikan pendapatan bagi bank berupa bunga.

c. Investasi Jangka Panjang (Penyertaan)

Pengalokasian dana bank dalam bentuk penyertaan dana pada suatu perusahaan dalam jangka panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pengalokasian dana bank dalam bentuk penyertaan ini adalah penerbitan surat-surat berharga (securities).

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit dan Analisa Kredit

Kredit menurut UU no. 10 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Sebagai lembaga pemberi kredit, kebijaksanaan yang ditempuh bank sangat terkait erat dengan *line of business* dari bank yang bersangkutan, bentuk dan sifat kredit yang dapat diberikan, pengaturan rencana kredit, pengaturan wewenang kredit dan pengamanan atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Dari sumber-sumber dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit, karena bunga atas kredit-kredit

yang dinikmati nasabah merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar.

Tujuan pemberian kredit adalah

1. Mencari keuntungan

   Tujuan pemberian kredit adalah memperoleh hasil atau keuntungan dari pemberian kredit tersebut kepada nasabah. Keuntungan tersebut berupa bunga yang diterima oleh bank, sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

   Keuntungan merupakan aspek penting bagi kelangsungan operasional bank, karena bank yang terus-menerus mengalami kerugian akan dilikuidasi.

2. Membantu usaha nasabah

   Tujuan pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

   Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan menunjukkan peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

   Keuntungan bagi pemerintah adalah

   - Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

- Membuka kesempatan kerja. Kredit pembangunan usaha atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor. Dan jika dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit maka akan menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, jika produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan eksport.

Disamping tujuan kredit, fasilitas kredit memberikan fungsi antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang

   Uang yang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan dimanfaatkannya uang sebagai kredit menjadi lebih berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

   Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan daya guna barang

   Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran uang

   Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar bertambah.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

   Kredit akan meningkatkan jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan membantu dalam mengekspor barang dari dalam dan luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. Hal ini dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi.

6. Meningkatkan kegairahan usaha

   Bagi nasabah yang modalnya minimum, kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

   Banyaknya kredit yang disalurkan akan meningkatkan jumlah pendapatan.

8. Meningkatkan hubungan internasional

   Pinjaman internasional dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara penerima kredit dan pemberi kredit. Pemberian

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Analisis kredit diberikan untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan kepada nasabah, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Tujuan analisis kredit adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis data maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih. Penyebab lain disebabkan oleh musibah yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

2.2.2. Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum kepada masyarakat terdiri atas berbagai jenis. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Kredit berdasarkan kegunaan

   Maksud dari kredit ini adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut sebagai kegiatan utama atau kegiatan tambahan.

   a. Kredit investasi

      Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru yang masa pemakaiannya untuk satu periode relatif lebih lama.

   b. Kredit modal kerja

      Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Kredit berdasarkan tujuan

   Maksud dari kredit ini adalah untuk melihat tujuan pemakaian suatu kredit, untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

   a. Kredit produktif

      Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Artinya kredit ini digunakan

untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumptif

Kredit konsumptif digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Kredit berdasarkan jangka waktu pinjaman

Kredit berdasarkan jangka waktu pinjaman artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya.

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah.

Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasa digunakan sebagai modal kerja atau investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang, di atas 3 tahun atau 5 tahun. Kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Kredit berdasarkan sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian rakyat atau perkebunan.

b. Kredit peternakan

Kredit peternakan diberikan untuk jangka waktu relatif pendek, misal untuk peternakan ayam dan untuk jangka panjang, misal untuk peternakan sapi atau kambing.

c. Kredit industri

Kredit industri digunakan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar

d. Kredit pertambangan

Kredit pertambangan merupakan kredit yang dibiayai dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit perumahan adalah kredit yang diberikan untuk membayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.2.3. Laporan Keuangan sebagai Sumber Analisa

Laporan keuangan adalah catatan tertulis tentang status keuangan dari individu dan asosiasi atau organisasi bisnis. Laporan keuangan ini terdiri atas neraca dan perhitungan R/L.

Neraca menunjukkan posisi keuangan bank, yang berupa aktiva; passiva; dan modal pada periode tertentu. Pengertian lebih luas, neraca adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematik yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank atau aktiva yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi dana pada periode yang dilaporkan, yang merupakan kewajiban bank (hutang) dan modal bank pada suatu saat atau periode tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada

aktiva[7]. Laporan R/L merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank serta biaya-biaya yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Tujuan pembuatan laporan keuangan bank adalah[8] :

1. memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
2. memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
3. memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
4. memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara fakta-fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntasi.

2.2.4. Ruang Lingkup Analisa Kredit

2.2.4.1. Evaluasi manajemen perusahaan debitur

Evaluasi manajemen terhadap perusahaan calon debitur, diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan manajemen perusahaan dalam menghadapi persaingan, membiayai

---

[7] Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *op. cit.*, hal. 541.
[8] Martono, *op. cit.*, hal. 62.

operasi perusahaan dan memperluas usaha serta mengatasi perubahan kondisi yang mempengaruhi perusahaan.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan oleh bank untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan yaitu:

1. Usia perusahaan

   Memberikan gambaran tentang kemampuan manajemen perusahaan dalam mengatasi berbagai macam kondisi yang mempengaruhinya seperti kondisi ekonomi, bisnis, sosial dan politik baik yang bersifat nasional maupun internasional.

2. Kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras

   Pimpinan teras harus mengetahui dengan jelas sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan serta mengetahui kontribusi yang diharapkan perusahaan dari pihak bank untuk mencapai sasaran tersebut.

3. Kedudukan perusahaan di pasar

   Menunjukkan seberapa kuat posisi perusahaan di pasar dapat diukur dari tinggi rendahnya pangsa pasar produk, jumlah penjualan setiap tahun dan arah perkembangannya dari tahun ke tahun, mutu layanan yang diberikan kepada konsumen, ketenaran merk dagang produk atau nama perusahaan di pasar serta efektifitas strategi pemasaran hasil produksi.

4. Kemampuan mengelola harta perusahaan

   Menunjukkan siklus perputaran kas yang dioperasikan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin cepat siklus perputaran kas akan semakin besar kesempatan perusahaan mengoperasikan dana tunai mereka secara produktif, sehingga akan semakin besar pula kemungkinan peningkatan laba perusahaan.

5. Kemampuan mengelola SDM

   Karyawan mempunyai peran penting dan sumbangan yang jelas terhadap kemajuan perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia secara pofesional dimulai sejak penyusunan rencana rekruitment tenaga kerja. Disamping itu manajemen juga perlu menyusun program pendidikan dan pelatihan karyawan. Untuk menjaga prestasi kerja yang memuaskan, karyawan harus mendapatkan balas jasa yang adil.

6. Kemampuan memperoleh keuntungan (profitabilitas)

   Keuntungan yang berkembang secara berarti dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan yang menghasilkannya telah dikelola secara baik. Perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang layak setiap tahun akan mampu menjaga eksistensi dalam jangka panjang bahkan mampu memperluas usaha bisnis perusahaan.

2.2.4.2. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi

Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi adalah kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan kredit dan membayar bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keberhasilan hasil produksi perusahaan.

Perkembangan pemasaran hasil produksi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Hasil evaluasi kedua faktor tersebut akan memberikan gambaran bagaimana potensi perusahaan calon debitur dalam memasarkan produksi.

Perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran hasil produksi akan menghadapi berbagai bahan pertimbangan yang berbeda-beda. Ada empat faktor pertimbangan yang mempunyai peranan penting. Empat faktor tersebut dikenal dengan strategi bauran pemasaran 4 P, yaitu: Product (produk yang dihasilkan), Price (harga penjualan produk), Place (distribusi perusahaan), Promotion (strategi promosi produk).

2.2.4.3. Analisis 5 C [9]

Kredit yang diberikan bank kepada suatu perusahaan harus melalui analisis secara mendalam, sehingga nasabah dianggap layak untuk memperoleh kredit. Pemberian fasilitas kredit kepada

[9] Kasmir, SE.,MM, Manajemen Perbankan, Rajawali Pers 2002, hal. 91.

nasabah, pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar dan pihak bank juga harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan pihak bank tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan kepada nasabah. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan terhadap nasabahnya. Salah satu prinsip pemberian kredit adalah dengan menggunakan analisis 5 C. Analisis 5 C yaitu:

1. Character

   Character adalah sifat atau watak seorang calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengalaman calon debitur dalam mengelola perusahaan, kejujuran dan kepiawaian, perkembangan usaha yang bersangkutan serta lamanya usaha tersebut berdiri. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.

2. Capacity (Capability)

Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuan calon debitur tersebut untuk membayar kredit.

3. Capital

Menitik beratkan pada aspek permodalan calon nasabah. Capital digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh pihak bank. Pihak bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100%, maksudnya setiap nasabah yang mengajukan pemohonan kredit harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Proporsi modal sendiri yang disyaratkan oleh pihak bank minimal sebesar 30% dari keseluruhan kebutuhan dana untuk pembiayaan.

4. Collateral

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Fungsi dari collateral atau jaminan ini adalah untuk melindungi bank dari kerugian, karena nilai dari jaminan kredit lebih besar dari angka kredit yang dipinjamkan

oleh pihak bank sehingga bank akan merasa aman. Aspek yang dianalisis adalah jaminan dari kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan dapat digunakan secepat mungkin.

Dalam kenyataannya, yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah:

- Jaminan dengan barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman atau kebun atau sawah, dan barang berharga lainnya.
- Jaminan surat berharga seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya.
- Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Orang atau perusahaan ini yang nantinya memberikan jaminan atau bertanggung jawab atau menaggung risiko jika terjadi kredit macet.
- Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap phisik obyek kredit. Jadi jika terjadi kehilangan atau kebakaran maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

5. Condition

Pihak bank dalam memberikan kredit harus pula menilai kondisi ekonomi pada saat ini dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil pemberian kredit untuk sektor tertentu sebaiknya jangan diberikan terlebih dahulu dan jika kredit tetap diberikan maka harus memperhatikan prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

2.2.4.4. Analisis Rasio Keuangan

1. Profitability ratio

Digunakan untuk mengukur efisiensi operasi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini membandingkan antara jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan jumlah hasil penjualan atau jumlah investasi dalam perusahaan.

- Profit Margin

$$\frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{penjualan}} \times 100\%$$

Digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan yang diterima serta biaya yang telah dikeluarkan. Operasi perusahaan dapat dikatakan efisien jika prosentase profit margin cukup besar.

- Return On Investment (ROI)

$$\frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Aktiva}} \times 100\%$$

Digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam pengelolaan seluruh dana yang sudah diinvestasikan ke dalam perusahaan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola dana dengan efisien.

- Return On Equity (ROE)

$$\frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Menggambarkan efisiensi pengelolaan dana yang telah ditanamkan para pemilik perusahaan.

2. Financial Leverage Ratio

- Debt to Equity Ratio

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Menggambarkan perbandingan antara total hutang dan modal sendiri. Rasio yang tinggi menunjukkan resiko

bank sebagai kreditur bagi perusahaan yang bersangkutan juga tinggi. Sebaiknya besarnya hutang lebih kecil dari modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi.

- Total Debt to Total Asset Ratio

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menggambarkan prosentase jumlah harta perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Rasio ini menggambarkan derajat risiko yang akan ditanggung oleh bank sebagai kreditur bagi perusahaan. Semakin rendah debt ratio perusahaan akan semakin baik karena tingkat keamanan dana kreditur lebih terjamin.

- Interest Coverage

$$\frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

Menggambarkan kemampuan perusahaan mengadakan dana untuk membayar bunga kredit yang jatuh tempo atau mengukur berapa kali besarnya laba dapat menutup

beban bunganya. Jika laba sebelum pajak dan bunga lebih besar dari bunga yang harus dibayarkan maka financial perusahaan cukup sehat.

3. Financial Liqudity Ratio

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang yang akan jatuh tempo.

- Current Ratio

$$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu yang kurang dari satu tahun dengan membandingkan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Current ratio yang tinggi menunjukkan jaminan yang lebih baik atas hutang jangka pendeknya.

- Quick Ratio

$$\frac{\text{Aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

Aktiva lancar dalam bentuk persediaan dianggap lebih sulit diuangkan dibandingkan dengan kas, deposito jangka pendek dan piutang dagang. Oleh karena itu

quick ratio tidak menyertakan persediaan dalam perhitungannya.

4. Activity's Performance Ratio

Digunakan untuk mengetahui efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola berbagai macam aktiva lancar perusahaan.

- Average Collection Period

$$\frac{\text{Piutang x 360 hari}}{\text{Penjualan kredit}}$$

Untuk mengetahui jumlah hari rata-rata yang dipergunakan untuk menagih piutang dagang dari para pelanggan. Average collection period yang melebihi jangka waktu kredit menunjukkan bahwa perusahaan kurang berhasil menagih piutang dagangnya.

- Inventory Turnover

$$\frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

Menggambarkan kemahiran manajemen perusahaan dalam mengawasi jumlah persediaan setengah jadi dan

bahan jadi. Inventory yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak persediaan yang belum terjual.

- Fixed Assets Turnover

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva tetap}}$$

Menggambarkan efisiensi pengelolaan harta tetap, terutama sarana produksi yang dioperasikan oleh perusahaan. Fixed assets yang rendah menunjukkan bahwa pemanfaatan aktiva tetap belum optimal, yang berarti bahwa ada kapasitas menganggur dari aktiva perusahaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 1895, Raden Wiriaatmadja dan kawan-kawan mendirikan "De Poerwokertoche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Bank Priyayi Poerwokerto)". Tahun 1896, W.P.D. de Wolf van Westerrode, Assisten Residen Poerwokerto yang menggantikan E. Sieburch bersama A.L. Schiff mendirikan "De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden dimana Raden Wiriaatmadja waktu itu juga duduk dalam kepengurusan. Pada tahun 1898 dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda dimana-mana didirikan Volksbanken atau Bank Rakyat.

Awal abad ke-20 Volksbanken tersebut mengalami kesulitan sehingga pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam perkembangan perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan Dianst der Volkscredietwesen (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membeku secara materiil yaitu dengan modal bimbingan, pembinaan dan pengawasan, sehingga perkreditan rakyat mulai tahun 1904 menjadi Regeringszong (tugas pemerintah). Pada tahun 1912 dengan Stbl. 1912-393 didirikan suatu lembaga berbadan hukum dengan nama Centrale Kas yang berfungsi sebagai bank sentral bagi Volksbanken pada umumnya termasuk bank desa. Sebagai akibat krisis internasional atau resesi ekonomi dunia pada tahun 1929 hampir

semua Volksbanken mengalami kesulitan sehingga tugas dan kewajiban diambil alih oleh Centrale Kas.

Pada tahun 1934 dengan Stbl. 1934-82 didirikan Algemene Volkskrediet Bank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa. Modal pertama berasal dari hasil likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih dari Volksbanken tersebut. Dengan demikian AVB sebagai kelanjutan Centrale Kas merupakan integrasi dari Volksbanken. Pada jaman pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tanggal 3 Oktober 1942 AVB di Pulau Jawa diganti namanya menjadi Syomin Ginko (Bank Rakyat).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1-1946 tanggal 22 Februari 1942 tentang "Aturan Bank Rakyat Indonesia" ditetapkan berdirinya BRI yang merupakan Bank Pemerintah yang dahulu berturut-turut bernama AVB dan Syomin Ginko.

Pihak Nederlandsche Indie Civil Administrasi di Jakarta mendirikan kembali kantor besar Algemene Volkskrediet Bank dan setelah ibukota RI di Yogyakarta dimasuki oleh Belanda, kantor besar BRI dihapus kembali. Akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan kepada negara RI tahun 1945.

Perkembangan sejarah politik Indonesia selanjutnya ternyata mempengaruhi sejarah BRI. Dengan Surat Keputusan tanggal 16 Maret 1950, Direksi BRI Negara Bagian RI 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan Direksi BARRIS (Bank Rakyat Repulik Indonesia

Serikat). Surat Keputusan Menteri Kemakmuran RIS meralatnya dengan menamakan direksi baru itu Direksi Algemene Volkskrediet (BRI). Aturan BRI Nomor 25-1951 tanggal 20 April 1951, menetapkan BRI sebagai Bank Menengah.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS dijadikan Negara Kesatuan Indonesia dengan UUDS 1950. Akan tetapi Algemene Volkskrediet Bank baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12-1951. Dengan demikian maka terhitung sejak tanggal tersebut BRI menjadi penerus dari Algemene Volkskrediet Bank dan meneruskan tugas dan kewajiban Algemene Volkskrediet Bank di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 41-1960 tanggal 26 Oktober 1960, LN Nomor 128 -1960, dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) dalam bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan:

1. Rakyat Indonesia dengan PERPU Nomor 42 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960
2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960
3. Nederlandsche Handel Mij (NHM) setelah dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/MUM II tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN)

Sebelum sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah dilaksanakan, semua bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 8-1965 tanggal 4 Juni 1965, dijadikan satu dengan Bank Indonesia. BKTN ikut diintegrasikan dalam BI dengan nama BI Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9-1965 tanggal 4 Juni 1965 dan surat Menteri Bank Sentral Nomor 42-1965 dan Nomor 47-1965.

Pada waktu Penetapan Presiden tersebut baru dijalankan 1 bulan, dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama BNI dimana BI Urusan Koperasi,Tani dan Nelayan (ex. BKTN) diintegrasikan dengan nama BNI Unit II. Selanjutnya Bank Negara dalam kegiatannya sehari-hari ex. Peleburan BRI dan Bank Tani Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan ex. Nederlandsche Handel Mij bekerja dengan nama BNI Unit II bidang Eksport-Import.

Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural/ Eksport-Import dipindahkan menjadi bank-bank milik negara dengan nama:

- BRI, yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Rural dengan UU Nomor 21 Tahun 1960.

- Bank Exim Indonesia, yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan peralatan BNI Unit II Bidang Eksport-Import dengan UU Nomor 22 Tahun 1968.

Untuk mengenang sejarah BRI maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor Keputusan S.S. 67/DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa hari jadi BRI adalah tanggal 16 Desember 1895.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dalam dunia perbankan di Indonesia menuntut BRI mengembangkan usahanya dalam memberikan jasa perbankan kepada masyarakat atau calon debitur. Tingkat persaingan dalam usaha jasa ini semakin tinggi baik yang datang dari negeri sendiri maupun dari luar negeri. Hal ini tidak lepas dari adanya kemudahan-kemudahan sistem perbankan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya kebijakan oleh pemerintah terhadap usaha perbankan seperti PAKJUN 1983, PAKTO 1988 dan PAKRI 1991.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992, BRI yang merupakan usaha millik pemerintah menjadi PT. BRI (Persero) yang merupakan usaha pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam penguasaan saham bank tersebut. Namun sebagian besar sahamnya masih dikuasai oleh pihak pemerintah.

Disamping adanya paket kebijaksanaan pemerintah yang merupakan dasar perubahan dalam peraturan perbankan di Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang menuju pada perbaikan ekonomi, membuka usaha perbankannya ke dalam percaturan dunia. Dengan usaha tersebut

diharapkan dapat diterima atau diakuinya usaha perbankan Indonesia dalam sistem perbankan internasional. Sebab dapat ditetapkan suatu tujuan yang penting, yaitu dalam rangka :

- Memperkuat tingkat kesehatan dan sistem perbankan Internasional
- Mengurangi timbulnya sumber yang menyebabkan persaingan yang tidak seimbang antar bank-bank Internasional secara wajar dan konsisten

3.2. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja

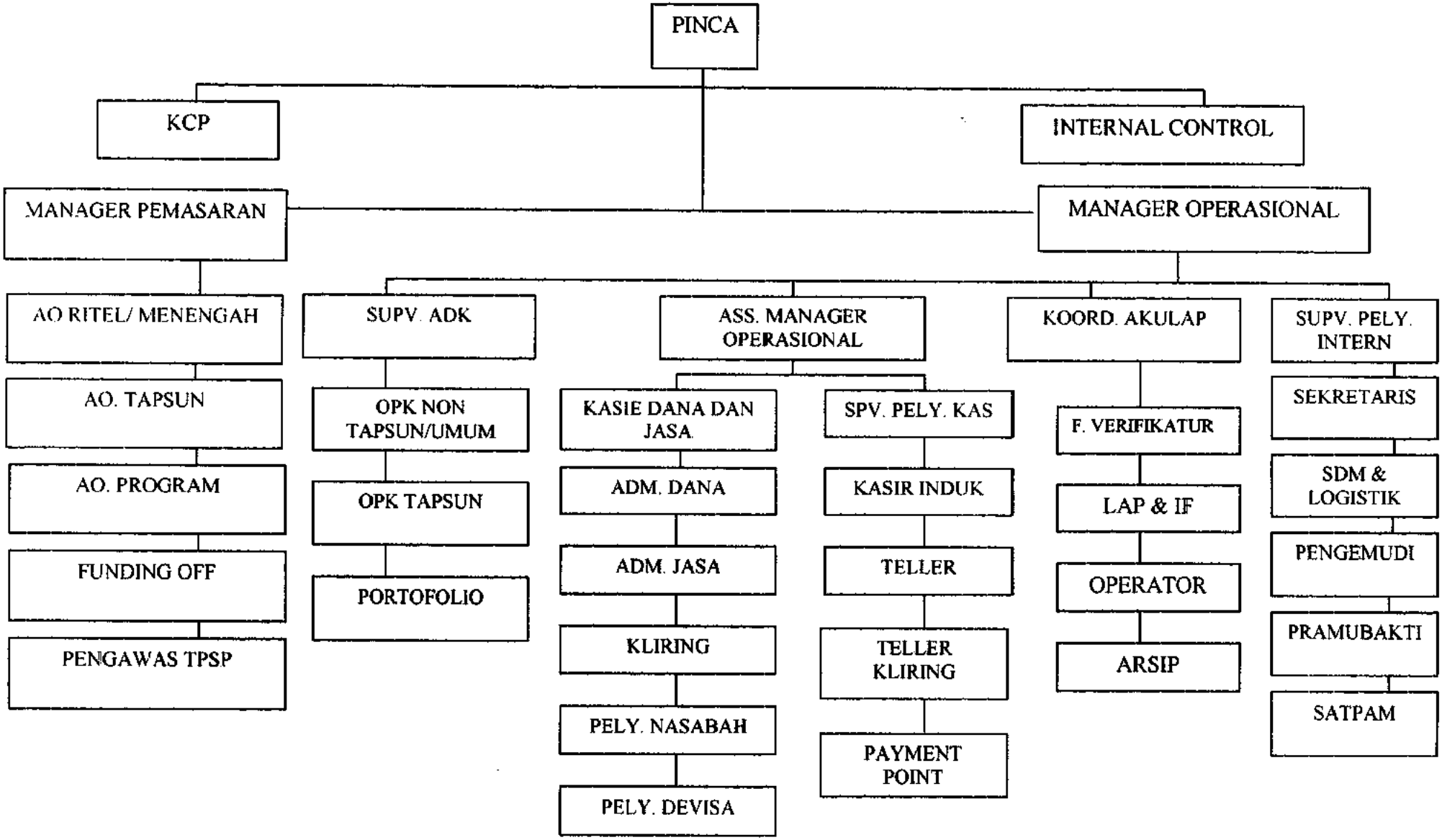
BRI Cabang Tulungagung berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro 2 B Tulungagung. BRI Cabang Tulungagung ini dibawah pengawasan BRI Wilayah Surabaya dan membawahi 17 buah BRI Unit yang tersebar seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

3.3. Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Bank serta Pembagian Kerjanya

Struktur organisasi BRI secara umum meliputi, BRI Pusat membawahi BRI Wilayah. Setiap BRI Wilayah membawahi beberapa BRI Cabang. BRI Cabang membawahi beberapa BRI Unit. Struktur organisasi BRI Cabang Tulungagung sebagai berikut:

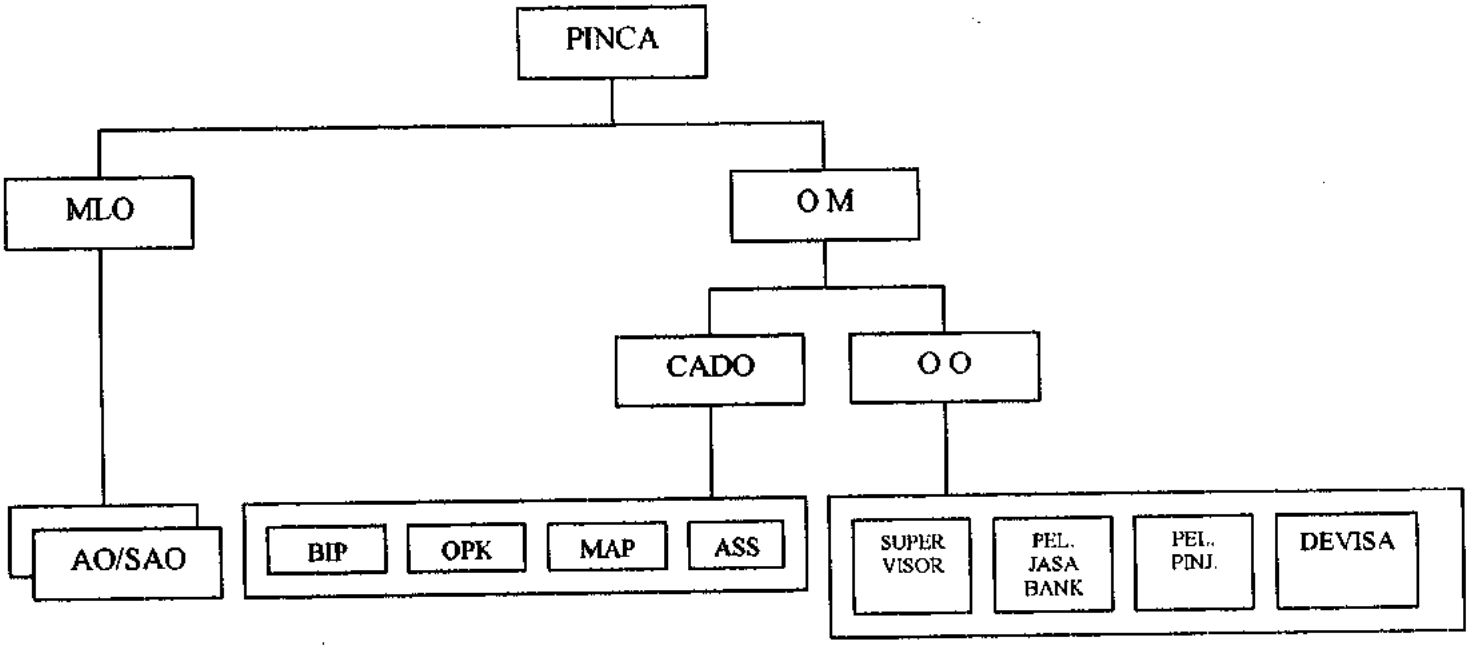
Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS PT. BANK INDONESIA (PERSERO)
CABANG TULUNGAGUNG



Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI PERKREDITAN
UNIT KANTOR CABANG



Dari bagan organisasi tersebut dapat diuraikan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing bagian yang berkaitan dengan proses pemutusan kredit, yaitu:

1. **Pemimpin Cabang**

   Seorang pemimpin Cabang bertugas untuk mengelola kegiatan kantor cabang BRI dan BRI Unit yang berada di bawah wilayah kerjanya. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang meliputi:

   a. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi dan mengupayakan pencapaian RKA.
   b. Menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan operasional di Kantor Cabang (Kanca), Kanca Pembantu (Kancapem), dan BRI Unit.
   c. Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mendukung penyusunan Pasar Sasaran, Kriteria nasabah yang dapat diterima dan rencana pemasaran tahunan kantor cabang.
   d. Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai di Kanca, Kancapem dan BRI Unit untuk meningkatkan kualitas setiap fungsi seperti : fungsi marketing, operasional dan support.
   e. Mengembangkan bisnis perkreditan di Kanca, Kancapem, dan BRI Unit guna memperoleh keuntungan/ penghasilan yang

optimal dengan resiko yang dapat diterima dan tetap mempertahankan kualitas portofolio yang sehat.

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dalam rangka menunjang bisnis.

g. Memiliki wewenang untuk memprakarsai, merekomendasi dan memutus kredit (kredit baru, suplesi, review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.

Wewenang Pemimpin Cabang antara lain:

a. Melakukan negosisi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan sesuai dengan kewenangannya.

b. Memprakarsai, merekomendasi dan memutus kredit (kredit baru, suplesi, review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.

c. Memberikan persetujuan peminjaman asli surat jaminan oleh debitur.

d. Memberikan persetujuan penggunaan biaya-biaya sesuai kewenangannya.

2. Manajer Pemasaran

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:

a. Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS),

Kriteria Nasabah yang dapat Diterima (KND) dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Kanca.

b. Menyusun RPT yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA), PS dan KND Kanca.

c. Menerapkan proses kredit sesuai dengan kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Retail yang telah ditetapkan terhadap Account yang termasuk portofolionya untuk mencapai target Kanca.

d. Melaporkan masalah-masalah perkreditan kepada Pinca.

e. Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa.

Wewenang Manajer Pemasaran antara lain:

a. Sebagai pemrakarsa permohonan pinjaman baru.

b. Memberikan rekomendasi unuk kredit putusan Pinca.

c. Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan kewenangannya dalam menganalisa, mengevaluasi/review dan memutus kredit.

d. Memutus kredit sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

3. Account Officer Ritel/Menengah

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:

a. Membuat RPT perkreditan atas sektor yang dikelolanya dan bertanggungjawab atas pencapaiannya.

b. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi tanggungjawabnya serta memantau hasil yang dapat

dicapainya (pendapatan/keuntungan) dan menetapkan prioritas pembinaan atas account yang dikelolanya.

c. Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca.
d. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit sebelum diputus.
e. Membuat usulan kepada Manajer Pemasaran dan atau Pinca untuk mengklasifikasikan pinjaman-pinjaman yang memperburuk.
f. Membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) atas pelaksanaan kunjungan nasabah baik dalam rangka pelayanan proses pinjaman maupun dalam rangka pembinaan dan penagihan pinjaman

Wewenang Account Officer Ritel/Menengah:

a. Mewakili BRI dalam negosiasi dengan debitur guna menyusun struktur dan tipe kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
b. Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisa kredit
c. Bertindak sebagai pejabat perekomendasi untuk kredit yang diprakarsai AO lainnya.
d. Sebagai perekomendasi (apabila diperlukan) dalam restrukturisasi/penyelesaian kredit bermasalah putusan Kanca.
e. Memutus kredit Kretap/Kresun sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pinca.

4. Account Officer Tapsun

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yaitu:

a. Membuat RPT Kretap/Kresun dan bertanggungjawab atas pencapaiannya.
b. Mengembangkan rencana pemasaran melalui Instansi Perusahaan.
c. Mempersiapkan naskah kerjasama dengan instansi yang pekerjanya akan dilayani kretap/kresun.
d. Meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada kretap/kresun, seperti keaslian surat keputusan, daftar gaji, dll.
e. Memberikan pertimbangan segi-segi positif dan negatif dan mengumpulkan data/keterangan yang diperlukan terhadap rencana pelayanan kredit kepada para pekerja Instansi/Perusahaan sebagai bahan pertimbangan Pinca/Pejabat pemutus didalam mengambil keputusan.
f. Mempelajari dan memahami Peraturan Kepegawaian yang berlaku di Instansi/Perusahaan tempat debitur bekerja.

Wewenang yang dimiliki AO Tapsun:

a. Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisa Kretap/Kresun dan sebagai perekomendasi untuk kredit yang diprakarsai AO lainnya.
b. Memutus kredit Kretap/Kresun sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pinca.

c. Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan wewenang yang diberikan Pinca.

5. Account Officer Program

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Membuat RPT atas Kredit Program dan bertanggungjawab atas pencapaiannya guna memenuhi target RKA yang telah ditetapkan.

b. Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan account yang menjadi tanggungjawabnya serta memantau hasil (laba/pendapatan) yang dapat dicapainya dalam rangka memaksimalkan keuntungan bank.

c. Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mendapatkan pendapatan yang optimal bagi Kanca.

d. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah guna memberikan kepuasan nasabah dengan memperhatikan kepentingan bank.

e. Menguasai account AO lain yang di back-up sesuai dengan yang ditentukan atasannya untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam pembinaan nasabah.

f. Mengawasi pengembalian kredit program pemerintah secara administratif maupun uji petik yang dibayar oleh petani/kelompok tani/KUD dalam rangka menjamin penggunaan kredit yang sesuai dengan ketentuan.

Wewenang yang dimiliki AO Program:

a. memprakarsai permohonan kredit program.
b. Menetapkan skala prioritas dalam pemecahahn dan penyelesaian masalah kredit yang timbul melalui koordinasi dengan Manajer Pemasaran/Pinca dan Instansi terkait.
c. Menginventarisasi calon nasabah yang akan dilayani.

6. Funding Off

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:

a. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuknya.
b. Mengidentifikasi sumber dana potensial/Calon Penyimpan Potensial (CPP) baik perorangan maupun Perusahaan/Instansi.
c. Menyusun rencana kerja tiga bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan untuknya oleh Pinca atau Manajer Pemasaran.
d. Menyusun rencana kerja bulanan, sebagai rincian dari rencana kerja tiga bulanan, untuk mengevaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap akhir bulan.

Wewenang Funding Officer:

a. Mewakili BRI dalam negosiasi dengan calon nasabah penyimpan sesuai batas kewenangannya.
b. Mengusulkan special rate simpanan kepada Pinca sesuai permohonan calon nasabah penyimpan.

c. Mengusulkan kepada Pinca hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran penghimpunan dana.

7. Pengawas TPSP

Bertugas dan bertanggungjawab:

a. Menerima laporan-laporan statistik TPSP , meneliti, meregister, mengkompilir dan menyelesaikannya sebagi tindak lanjut.

b. Mengelola laporan tentang pemberian kredit BRI kepada TPSP dan kelanjutannya.

c. Memberikan tanggapan permasalahan TPSP yang timbul.

d. Memberikan bimbingan perbaikan administrasi TPSP.

e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasannya.

8. Manajer Operasional

Tugas dan Tanggung Jawabnya antara lain:

a. Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk devisa) dan pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan.

c. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan sudah ditindaklanjuti dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Memastikan semua laporan untuk kepentingan intern dan ekstern telah dibuat dan dikirim tepat waktu.

e. Memastikan bahwa setiap pelaksanan administrasi kredit telah berjalan sesuai ketentuan.

Wewenang yang dimiliki antara lain:

a. mengelola kas Kanca dan surat-surat berharga.

b. Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi, kecuali biaya promosi dan representasi.

c. Menyetujui pembayaran transaksi tunai serta kliring dan mengesahkan transaksi pemindahbukuan dalam jumlah tidak terbatas.

d. Memberikan ijin transaksi dan koreksi

e. Menandatangani nota-nota antar kantor/hubungan BRI Unit, dokumen dan laporan.

9. **Assisten Manajer Operasional (AMO)**

Tugas dan Tanggung Jawabnya antara lain:

a. Mengelola kas Kanca (Rp. Dan Valas) sesuai maksimum kas yang ditetapkan, melaksanakan pergeseran kas antar unit kerja dan memeliharakerjakan register sesuai ketentuan.

b. Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam kurun waktu setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya.

c. Memeliharakerjakan Register dan penyimpanan Surat Berharga, Buku Tabungan Britama serta kuitansi payment point.
d. Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan serta rekening peserta Phone Banking/Transaksi Antar Cabang (TAC)
e. Memastikan kebenaran pembuatan/penerimaan dokumen/nota yang berkait dengan pelayanan dana dan jasa (termasuk devisa).
f. Memastikan kebenaran pembuatan laporan yang menjadi tanggungjawabnya.

Wewenang AMO antara lain:

a. Memegang salah satu kunci kluis dan brandkas.
b. Menyetujui pembayaran transaksi tunai, kliring .dan pemindahbukuan dalam batas wewenangnya, baik OLSIB maupun pada bukti pembukuan.
c. Mengelola semua surat berharga yang ada di Kanca.
d. Melakukan jurnal transaksi gaji kolektif pada OLSIB.
e. Memberikan ijin transaksi dan koreksi dalam batas wewenangnya.

10. Supervisor Administrasi Kredit

Tugas dan Tanggung Jawabnya:

a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di Kanca.
b. Memantau portofolio kredit Ritel/Menengah (Non Tapsun/Tapsun) sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajemen Kanca.

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PTK terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.

d. Membantu melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) ditingkat Kanca.

Wewenangnya antara lain:

a. Menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK), setelah persyaratan kredit terpenuhi.

b. Melakukan pembatasan pencairan kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PTK.

c. Menolak permohonan kredit non Tapsun yang tidak memenuhi KRD dan KND.

d. Menerima bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam PTK.

11. OPK Non Tapsun/Umum

Tugas dan Tanggung Jawabnya antara lain:

a. Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran, KRD dan KND.

b. Memelihara kerjakan berkas I pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menyiapkan Instruksi Pencairan Kredit.

d. Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari intern maupun ekstern.

Wewenangnya antara lain mengambil dan menyimpan berkas I pinjaman, menyiapkan bukti pembukuan (maker) untuk over booking transaksi pinjaman.

12. OPK Tapsun

Tugas dan Tanggung Jawabnya antara lain:

a. Membantu nasabah untuk menyiapkan tanda setoran biaya-biaya dalam rangka pemberian kredit.
b. Menyiapkan surat perjanjian kredit.
c. Menyiapkan daftar penagihan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Tapsun

Wewenang yang dimiliki antara lain menolak permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, menerima dokumen asli Tapsun, mengambil dan menyimpan dokumen asli Tapsun dari/ke dalam kluis.

13. Portofolio Kredit

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memeliharakerjakan data portofolio kredit (up dating data statis dan dinamis pinjaman), menyajikan informasi perkreditan yang diperlukan oleh Pejabat Lini Perkreditan, dan menyiapkan laporan-laporan perkreditan baik yang diperlukan oleh intern maupun ekstern BRI.

14. Koord. AKULAP

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:

a. Memastikan bahwa proses pembukuan di Kanca dan Kanca lain telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memastikan bahwa kegiatan rekonsiliasi pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan.

Wewenang Koord. AKULAP yaitu meminta informasi yang diperlukan bagi kepentingan bidang tugasnya kepada semua fungsi yang ada di Kanca dan Kanca lain dan memeriksa tabel sistem pembukuan di OLSIB telah terpasang dengan benar.

15. Administrasi dana dan Jasa (Kasie)

Tugas dan Tanggung Jawabnya:

a. Melakukan pengawasan atas semua kegiatan pelayanan dana, jasa (termasuk rekening kerjasama serta devisa) dan pinjaman yang dilakukan oleh petugas Administrasi dana dan jasa.
b. Meyakinkan kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber dan melakukan pengecekan atas semua transaksi pemindahbukuan pada bidang dana dan jasa bank.
c. Menjamin kelancaran Pengiriman Uang masuk/keluar sesuai dengan kewenangannya.
d. Memastikan kebenaran/keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan devisa.

16. Kasir Induk

Tugas dan Tanggung Jawabnya:

a. Melayani pergeseran (setoran/tambahan) kas teller.
b. Mengelola kas kasir induk yang berasal dari teller.
c. Memastikan uang phisik telah dihitung, disortir, dibendel, diikat dan diparaf.
d. Menjamin kelancaran pelayanan kepada nasabah dengan transaksi yang jumlahnya besar.

Wewenang Kasir Induk yaitu:

a. Memantau sisa kas teller.
b. Menerima setoran kas teller
c. Menangani transaksi yang jumlahnya besar.

17. Teller

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:

a. Membuat aplikasi tambahan kas awal dan menerima uang dari supervisor/AMO.
b. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya.
c. Menjamin kebenaran dan kelengkapan pengisian data PU keluar sebelum dilakukan pembukuan dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pengiriman Uang keluar sesuai dengan kewenangannya.

Wewenang Teller yaitu melaksanakan fungsi cheker atas transaksi tunai, menjaga kas teller tidak melampaui maksimum kas yang ditetapkan, dan menyetujui pembayaran transaksi tunai dalam batas kewenangannya.

18. Supervisor Pelayanan Intern

Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Memastikan bahwa tugas-tugas dibidang personalia, logistik (termasuk surat berharga untuk Kanca lain) dan keamanan di Kanca telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan ynag berlaku.

b. Memeliharakerjakan register: Aktiva Tetap, Penyusutan Aktiva Tetap, Biaya-biaya, Inventaris kantor, dll.

Wewenangnya adalah memeriksa (Checker) atas setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan bidang rumah tangga sesuai dengan kewenangannya.

3.4. Sumber Daya Manusia

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis karena adanya kebijakan-kebijakan deregulasi yang berakibat BRI harus melakukan berbagai penyesuaian termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Kebijakan BRI yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia yaitu:

a. Pembinaan pegawai

Persaingan antar bank menuntut sumber daya manusia yang memiliki sikap profesional tinggi sehingga siap untuk bersaing dan perubahan-perubahan orientasi ke arah peningkatan efisiensi dan produktifitas. Langkah-langkah perbaikan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BRI meliputi:

- Penerapan Potential Appraisal Performance (PAP)
- Penerapan sistem pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan (Training Need Assesment/TNA)
- Recruitmen Internal Instructur (II)

Kegiatan pendukung lain ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, direksi BRI mengadakan wawancara secara berkala kepada para pejabat BRI terutama pemimpin cabang dan staf, untuk mengetahui wawasan dan keahlian mereka di bidang perbankan secara tekhnis maupun teoritis serta mengenai pengetahuan umum lainnya.

b. Streamlining (Perampingan)

Kondisi persaingan antar bank mengakibatkan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman menjadi tinggi, sehingga berdampak negatif terhadap BRI terutama pada penurunan laba. Tindakan antisipatif yang dilakukan oleh BRI untuk mengatasi masalah tersebut yaitu berupa penyehatan porofolio, penataan organisasi

dan efisiensi, termasuk streamlining (perampingan) pegawai BRI atau rasionalisasi. Rasionalisasi yang dilakukan oleh BRI antara lain dengan pendekatan pensiun dipercepat bagi pegawai yang telah mempunyai hak pensiun dan berumur 50 tahun keatas dan program pensiun tertunda bagi pegawai yang telah mempunyai hak pensiun tetapi usianya dibawah 50 tahun.

3.5. Data Produk dan Jasa BRI Cabang Tulungagung

3.5.1. Simpanan

1. BRITAMA

   Adalah bentuk tabungan yang praktis, mudah, fleksibel, aman, menguntungkan dan didukung oleh teknologi yang handal.

2. SIMASKOT

   Adalah simpanan masyarakat perkotaan di BRI Unit pelaksana simaskot yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi.

3. SIMPEDES

   Adalah simpanan pedesaan yang dilayani BRI Unit yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi.

4. DEPOBRI Rupiah

   Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Indonesia, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.

5. DEPOBRI Valas

   Adalah simpanan pihak ketiga berupa deposito dalam bentuk mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu yang sudah diperjanjikan antara deposan dengan BRI.

6. DEPOSITO ON CALL

   Adalah simpanan atau deposito atas nama pihak ketiga (perorangan, perusahaan, yayasan atau dan pensiun,dll) atau bank yang penarikannya dapat dilaksanakan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan nasabah secara lisan (per telepon) atau secara tertulis (via facsimile) kepada kantor cabang BRI yang bersangkutan.

7. GIROBRI

   Adalah jenis simpanan BRI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah pembayaran lainnya.

8. GIRO Valas

   GIRO Valas adalah simpanan dalam valuta asing pihak ketiga pada BRI.

yang setiap sat dapat diambil alih oleh pemegang rekening yang bersangkutan.

3.5.2. Pinjaman (Kredit)

1. KREDIT RETAIL, meliputi

a. Kredit Modal Kerja Lokal

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan penambahan modal kerja usaha yang ditawarkan dalam bentuk rekening koran dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. Nasabah bebas menentukan kapan akan melakukan penarikan dan penyetoran pinjaman disesuaikan dengan jenis perkembangan usaha bisnis nasabah.

b. Kredit Modal Kerja Ekspor / Impor

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja usaha yang terkait dengan transaksi ekspor / impor.

c. Kredit Modal Kerja Konstruksi

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja usaha jasa konstruksi.

d. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan tambahan dana untuk pembelian kendaraan, mendukung usaha, perluasan pabrik atau pembangunan pabrik baru. BRI akan menyediakan fasilitas kredit investasi, dimana nasabah cukup menyediakan dana

sebesar 35% dari total nilai proyek yang akan di kerjakan dan BRI akan menyediakan sisa dana yang dibutuhkan.

e. Kretap

Merupakan fasilitas kredit multi guna untuk nasabah yang termasuk karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, seperti PNS, TNI / POLRI, Karyawan BUMN atau BUMND, dan swasta.

f. Kresun

Merupakan fasilitas kredit multi guna untuk nasabah penerima pensiun baik PNS, POLRI, BUMN, BUMD, Swasta.

2. KREDIT MIKRO

Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Sasaran Kupedes meliputi perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak dan golongan masyarakat berpenghasilan tetap. Sedangkan sektor yang dibiayai Kupedes meliputi sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa lainnya dan golongan berpenghasilan tetap.

3.5.3. Jasa lain

1. ATM BRI

Jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui ATM antara lain :

a. Informasi saldo

b. Penggantian PIN

c. Penarikan tunai

d. Transfer antar rekening (BritAma)

e. Pembayaran tagihan telepon

f. Pembayaran tagihan listrik

g. Pembayaran tagihan telepon selular (Pasca Bayar)

h. Pembelian pulsa (pra bayar)

2. Kliring

Kliring dalah proses penyampaian suatu surat berharga dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik hingga adanya penerimaan dari Bank Tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Warkat yang dapat diteruskan cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer, nota kredit atau warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Sentral (BI).

3. Tabungan Haji

Tabungan Haji BRI akan membantu mewujudkan impian menjadi haji yang mabrur.

3.6. Kebijaksanaan Perbankan dan Dampaknya bagi BRI

Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perbankan pada bulan Juni 1983, mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Penghapusan sistem pagu kredit.
2. Kebebasan untuk menetapkan tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan.
3. Pengurangan Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

Kebijakan ini merangsang bank-bank dan lembaga keuangan untuk kembali kepada prinsip manajemen perbankan yang wajar dan sehat. Bentuk subsidi bunga dibatasi dan hanya diberikan untuk scheme perkreditan prioritas tertentu, sedangkan penentuan suku bunga kredit non prioritas dan bunga simpanan diserahkan kepada lembaga perbankan atau keuangan yang bersangkutan.

Dampak dari deregulasi tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan dan pendirian lembaga keuangan yang sehat. Dampak lain dari deregulasi juga menimbulkan persaingan yang kuat di kalangan perbankan.

Dengan diberlakukannya deregulasi, BRI dituntut untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan program kerja dengan meningkatkan fungsinya sebagai suatu bank komersial tanpa meninggalkan fungsinya sebagai agen pembangunan. BRI juga dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin menemukan cara-cara mobilisasi dana yang efisien serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit yang efektif.

Pada tanggal 12 September 1986 Pemerintah RI melakukan kebijakan dengan mengadakan devaluasi. Dampak devaluasi bagi BRI mampu menjadi pendorong dalam peningkatan ekspor yang didukung dengan penambahan cabang devisa BRI dan peningkatan simpanan masyarakat.

Pada tahun 1987 terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987 (Pakjan 1987), Paket Juni 1987 (Gerakan Sumarlin) dan Paket Kebijaksanaan Ekonomi dan Perdagangan pada tanggal 24 Desember 1987 (Pakdes1987).

Dari ketiga kebijaksanaan tersebut, Pakjan dan Gebrakan Sumarlin mempunyai pengaruh yang besar terhadap BRI. Pakjan 1987 merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi usaha yang lebih baik dengan mengadakan pembebasan tata niaga impor yang sebelumnya diatur oleh Departemen Perdagangan RI dan mengandung monopoli dan oligopoli. Gebrakan Sumarlin dimaksudkan untuk menarik semua dana BUMN dari bank-bank serta mengkonversikan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Paket 29 Januari 1990 (Pakjan 1990) yang dikeluarkan oleh pemerintah berisi pokok-pokok kebijakan antara lain:

1. Bank diminta untuk memelihara atau meningkatkan porsi minimal KUK (Kredit Usaha Kecil) sebesar 20% dari portofolio perkreditan yang dibiayai dengan dana sendiri dalam satu tahun.
2. Penarikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia secara bertahap, kredit likuiditas yang jatuh tempo tidak diperpanjang lagi

Setelah Pakjan 1990, pada bulan Agustus 1990 pemerintah melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) yaitu menaikkan suku bunga SBI serta memperjualbelikan kepada masyarakat umum. Kebijakan ini berdampak pada pihak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas dan suku bunga deposito melonjak naik. Deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 28 Februari 1991 (Paktri1991) merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan upaya penyehatan perbankan. Penyempurnaan tersebut meliputi aspek persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan, pedoman operasional atas dasar prinsip kehati-hatian, termasuk permodalan, sistem pelaporan, tata cara penilaian tingkat kesehatan dan faktor penunjang yang diperlukan bagi pengembangan usaha bank. Perbankan diharuskan untuk mengikuti aturan yang berlaku secara internasional, sehingga dapat bersaing di dunia internasional. Sesuai dengan aturan Bank for International Setlements (BIS), yaitu Standart Kecukupan Modal (Capital Adequency Ratio atau CAR) yang ditetapkan adalah 7% pada bulan Maret 1993 dan 8% pada bulan Desember 1993.